

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, populasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Juga akan dibahas mengenai operasional variabel penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif karena untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini dibutuhkan kedua metode tersebut, misalnya untuk mengkonfirmasi temuan dari sumber yang berbeda (Creswell, 2003:210)

Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik. Karenanya dalam penelitian kuantitatif pengukuran terhadap gejala yang diamati menjadi penting, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (angket) yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif.

Menurut Strauss dan Corbin (2003) penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Penelitian kuantitatif pada penelitian ini dengan menggunakan kuesioner terhadap responden pejabat yang berwenang dalam bidang P4GN pada instansi anggota BNN. Sedangkan untuk penelitian kualitatifnya dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan kunci yaitu beberapa pejabat yang berwenang dalam bidang P4GN pada instansi anggota BNN.

B. Populasi Penelitian

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah para pejabat yang menangani bidang P4GN di instansi anggota BNN dengan jumlah 28 instansi pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Sekretaris Jenderal, Departemen Perhubungan
- b. Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional
- c. Sekretaris Jenderal, Departemen Agama
- d. Sekretaris Jenderal, Departemen Komunikasi dan Informatika
- e. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam Negeri
- f. Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri
- g. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Departemen Pertahanan
- h. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- i. Direktur Jenderal Pemasarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- j. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
- k. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian
- l. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan
- m. Direktur Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian
- n. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan
- o. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- p. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan
- q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial
- r. Sekretaris Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
- s. Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga
- t. Deputi Bidang Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara
- u. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan
- v. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- w. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia

- x. Kepala Bidang Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia
- y. Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia
- z. Kepala Biro Bimbingan Masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia
- aa. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia
- bb. Kepala Pusat Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia

Dari 28 (dua puluh delapan) responden yang penulis berikan kuesioner, ternyata hanya ada 16 (enam belas) responden yang memberikan jawaban atas kuesioner tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Sekretaris Jenderal, Departemen Perhubungan
- b. Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional
- c. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- d. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
- e. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian
- f. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan
- g. Direktur Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian
- h. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- i. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan
- j. Sekretaris Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
- k. Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga
- l. Deputi Bidang Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara
- m. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan
- n. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- o. Kepala Bidang Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia
- p. Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) responden, sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum memberikan jawaban atas kuesioner tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Sekretaris Jenderal, Departemen Agama
- b. Sekretaris Jenderal, Departemen Komunikasi dan Informatika

- c. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam Negeri
- d. Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri
- e. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Departemen Pertahanan
- f. Direktur Jenderal Pemasarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- g. Diektur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan
- h. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- i. Kepala Biro Bimbingan Masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia
- j. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia
- k. Kepala Pusat Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia

Dari 16 (enam belas) responden yang memberikan jawaban tersebut, peneliti menganggap bahwa jumlah tersebut sudah bisa mewakili dari keseluruhan responden dan sudah dapat dianalisa karena dengan jumlah tersebut berarti penulis sudah mendapatkan jawaban kuesioner sebesar 57,14% dan dari jawaban yang masuk pada umumnya merupakan instansi anggota BNN yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar kepada BNN dalam upaya-upaya P4GN serta masalah keterbatasan waktu.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan :

1. Angket (Kuesioner)

Angket (Kuesioner), yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan peneliti. Tujuan penyebaran angket adalah untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Disamping itu, responden mengetahui informasi tertentu

yang diminta. (Riduwan, 2004:99). Pertanyaan dalam bentuk kuesioner diberikan kepada para pejabat yang menangani bidang P4GN pada 28 (dua puluh delapan) instansi anggota BNN.

2. Wawancara (interview) mendalam

Esterberg (Sugiyono, 2007:74) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengumpulkan informasi kinerja instansi anggota BNN dalam mengimplementasikan kebijakan Strategi Nasional P4GN dan telah dilakukan terhadap informan kunci (*key informan*) yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Biro Umum Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, Direktur Pengawasan Napza Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, dan Staf Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca/studi pustaka melalui membaca, mencatat, mengutip, membandingkan dan menghubungkan bahan-bahan yang relevan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh agar memudahkan pengelolaannya.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam kegiatan penelitian adalah :

- a. Editing data, yaitu proses memeriksa dan mengoreksi semua jawaban responden kuesioner. Jika terdapat kekeliruan teknis dalam penafsiran jawaban responden maka dilakukan perbaikan seperlunya untuk meluruskan atau membenarkan kesalahan penafsiran jawaban responden dimaksud.
- b. Pengukuran dan penentuan nilai, yaitu proses penyederhanaan jawaban responden dalam kuesioner kemudian ditentukan nilainya yang disusun berdasarkan jumlah alternatif jawaban yang tersedia dalam kuesioner.

Skala ukur yang digunakan untuk masing-masing item kuesioner adalah *skala likert* yang bergerak dari angka 1 sampai 5. *Skala Likert*

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.(Riduwan. 2007:86). Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa *skala likert* dianggap paling tepat dalam penelitian ini karena sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur pendapat, persepsi dalam sikap terhadap suatu kejadian. Dengan demikian, penilaian jawaban atas jawaban responden adalah :

- 1) Sangat tidak setuju, sangat tidak mengetahui, sangat tidak memahami, sangat tidak memadai, sangat tidak diperlukan, sangat tidak sesuai, sangat tidak pernah. Dengan skor = 1
- 2) Tidak setuju, tidak mengetahui, tidak memahami, tidak memadai, tidak perlu, tidak sesuai, tidak pernah. Dengan skor = 2
- 3) Ragu-ragu, dengan skor = 3
- 4) Setuju, mengetahui, memahami, memadai, diperlukan, sesuai, pernah. Dengan skor = 4
- 5) Sangat setuju, sangat mengetahui, sangat memahami, sangat memadai, sangat diperlukan, sangat sesuai, sangat pernah. Dengan skor = 5

2. Analisis Data

Setelah pengumpulan data primer dan data sekunder, maka hasil selanjutnya dilakukan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menganalisa data dari hasil olahan SPSS, dan analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisa data dari hasil wawancara mendalam.

Selanjutnya dilakukan penyajian analisis data melalui paparan yang logis, objektif, dan sistematis dan didukung dengan teori yang relevan. Dengan demikian diharapkan dapat diungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta yang melatar belakanginya, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan penyampaian saran pada bab penutup.

a. Operasional Variabel Penelitian

Berkaitan dengan deskriptif yang ingin mengkaji sudahkah suatu kebijakan Strategi Nasional P4GN yang telah diimplementasikan pada instansi anggota BNN telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan 6 (enam) variabel penelitian yakni : 4 (empat) variabel penelitian yang dikemukakan oleh George C. Edward III, 1 (satu) variabel penelitian yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Van Horn ditambah 1 (satu) variabel yang berhubungan dengan pelaksanaan program dari kebijakan itu sendiri. Keenam variabel tersebut dianggap cukup diperlukan dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik dengan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan diteliti, maka analisa dilakukan dengan variabel sebagai berikut :

- a. Komunikasi
- b. Sumber-sumber
- c. Kecenderungan-kecenderungan (sikap)
- d. Struktur Birokrasi
- e. Hubungan antar organisasi
- f. Pelaksanaan program

Keenam variabel penelitian tersebut di atas dapat diuraikan seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.1
Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Skala
1.	Komunikasi : Komunikasi kebijakan membahas tiga hal penting yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan merupakan persyaratan pertama bagi implementasi	i. Pengetahuan tentang isi Surat Keputusan Ketua BNN Nomor : Skep/92/XII/2004/ BNN tentang Strategi Nasional P4GN BNN Tahun 2005 – 2009 i. Pemahaman tentang maksud dan tujuan ditetapkan Strategi Nasional P4GN? i. Pengetahuan yang harus dilakukan	Likert

kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam melaksanakan Strategi nasional P4GN?

- | | | |
|---|--|---------------|
| <p>2. Sumber – sumber :</p> <p>Merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik dengan alasan bahwa setiap perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksanaan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif</p> | <p>i. Instansi anggota BNN mempunyai petugas/pegawai yang khusus menangani program P4GN</p> <p>i. Instansi anggota BNN mempunyai jumlah pegawai/petugas yang cukup untuk melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN</p> <p>i. Petugas/pegawai yang ada telah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan tentang narkoba dan program P4GN</p> <p>ii. Petugas/pegawai bidang P4GN telah mengikuti Diklat Teknis mengenai upaya-upaya P4GN</p> <p>iii. Instansi anggota BNN mengalokasikan secara khusus dana untuk mendukung program P4GN</p> <p>i. Jumlah dana yang tersedia pada instansi anggota BNN untuk pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN sudah memadai</p> <p>i. Petugas/pegawai memperoleh dukungan sarana kegiatan yang baik dalam melaksanakan Strategi Nasional P4GN</p> | <p>Likert</p> |
|---|--|---------------|

<p>3. Kecenderungan (sikap) Merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi bagi implementasi kebijakan, jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti dukungan dari pelaksana</p>	<p>i. Strategi Nasional P4GN diperlukan dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015</p> <p>1. Instansi anggota BNN memiliki pandangan yang sama dengan BNN dalam melaksanakan Strategi Nasional P4GN</p> <p>1. Petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN diberikan wewenang sesuai dengan bidang tugasnya</p> <p>i. Wewenang yang diberikan kepada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN sudah dijalankan dengan baik</p>	<p>Likert</p>
<p>4. Struktur Birokrasi Birokrasi merupakan hal yang paling penting, bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi secara sadar atau tidak memilih bentuk-bentuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern</p>	<p>i. Instansi anggota BNN mempunyai tupoksi yang sesuai dengan isi kebijakan Strategi Nasional P4GN</p> <p>i. Tindakan para petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN sudah sesuai dengan tupoksi yang ada</p> <p>1. Instansi anggota BNN sudah memiliki seksi/bagian yang menangani bidang P4GN</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan Strategi nasional P4GN pada instansi anggota BNN telah dikoordinasikan dengan BNN</p>	<p>Likert</p>
<p>5. Hubungan Organisasi Implementasi sebuah program dukungan</p>	<p>Antar i. Koordinasi antara instansi anggota BNN dengan BNN sudah berjalan dengan baik</p> <p>i. Pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN, apakah koordinasi</p>	<p>Likert</p>

koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan instansi lain

antara instansi anggota BNN dengan instansi lain sesama anggota BNN sudah berjalan dengan baik

i. Rapat koordinasi dengan instansi anggota BNN yang diselenggarakan BNN sudah memadai

- | | | |
|--|--|---------------|
| <p>6. Pelaksanaan Program Diperlukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program dari suatu kebijakan</p> | <p>7. Kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN</p> <p>7. Kebijakan Strategi Nasional P4GN yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya P4GN, sudah dirasakan cukup</p> <p>i. Kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang ada dalam kebijakan tersebut</p> | <p>Likert</p> |
|--|--|---------------|

